

INTERAKSI ANTAR AKTOR DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI KAWASAN PANTAI MATAHARI TERBIT

Wulan Agnesia Sipahutar¹⁾, Bandiyah²⁾, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : , wulanagnesia@student.unud.ac.id¹⁾, dyah_3981@unud.ac.id²⁾,
mahaswari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study analyzed the problem of how is the interaction between actors in the Sunrise Beach park, by looking at the pattern of each interaction, namely First, the interaction between Sanur Village and Sanur Bersatu. The second is the interaction of Sanur Village with Denpasar Parking Company. Third, Sanur Village with Denpasar Parking Company and Private Company (Skyline). The study uses State in Society theory and Political Economy theory. This research used a descriptive qualitative method by using primary and secondary data. This research shows that the relationship between Denpasar Parking Company, Skyline and Sanur Village is based on the principle of interdependence and mutual need. The involvement of various actors is a fairly good implementation of political economic policies in Sanur area, where always considering the harmony of power and social living in the community, so that the parties involved are quite advantaged in the sustainability of parking management.

Keywords: Interaction of Actors, Parking Management, State in society, Sunrise Beach.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah memiliki hak dalam mengurus, menyusun dan mengatur seluruh aspek di daerahnya dengan mandiri dengan bebasnya campur tangan dari Pemerintah Pusat. Dalam mengurus kepentingan daerahnya, tanggung jawab yang dimiliki pemerintah daerah sangatlah besar dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pemasukan daerah ialah retribusi daerah, yang merupakan penarikan uang sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai ibukota Provinsi Bali, Denpasar tumbuh

menjadi Kota yang memiliki perkembangan pesat dalam ekonomi serta pembangunan.

Meningkatnya tumbuh kembang perekonomian, beriringan pula dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang ada di Kota Denpasar. Saat ini, Denpasar menjadi daerah yang memiliki kepadatan kendaraan nomor satu dengan jumlah kendaraan mencapai 1.420.997 unit di tahun 2019 (BPS, 2020). Pemerintah daerah tentunya dapat memanfaatkan peristiwa ini dalam menggenjot pendapatan daerah melalui retribusi parkir, dengan menyediakan fasilitas parkir. Akibat besarnya keuntungan dari lahan parkir ini,

banyak aktor menjadi ingin ikut terlibat dalam mengelola parkir.

Pada hakikatnya, parkir Kota Denpasar di kelola, diselenggarakan dan diatur oleh Perusahaan Daerah Parkir Denpasar (Perumda Bhukti Praja SewakaDarma) berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 296 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perparkiran di Kota Denpasar, yang menyebutkan bahwa "*Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran di Kota Denpasar secara efektif dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar per 1 Oktober 2004*". Tidak berhenti di PD Parkir saja, kehidupan sosial di Bali yang tidak bisa lepas dengan masyarakat adat, mengakibatkan desa adat dan organisasi kemasyarakatan ikut turut ambil bagian dalam pengelolaan parkir.

Termasuk di kawasan Pantai Matahari Terbit, yang mengikutsertakan Desa Adat Sanur dalam pengelolaan parkir. Politik perparkiran di Pantai Matahari Terbit ini, merupakan salah satu pengelolaan parkir yang didalamnya melibatkan pihak lain selain pemerintah sebagai aktor resmi dalam pengelolaan. Namun terdapat satu kasus yang meresahkan dan membuat gelisah masyarakat adat, yaitu adanya kasus penangkapan pekalang yang diduga melakukan pungutan atau retribusi yang tidak dilandasi dengan adanya MoU dengan PD Parkir Denpasar (DetikNews, 2018). Permasalahan ini yang akhirnya menjadi polemik, karena belum ada suatu kesepakatan antara masyarakat desa dan pemerintah tentang hak dan kewajiban yang dimiliki desa adat.

PD Parkir merasa diabaikan karena tidak ikut disertakan dalam pengelolaan parkir di Pantai Matahari Terbit dan dewan desa adat yang bersikeras untuk tetap menarik pungutan di tanah milik desa sendiri tanpa membagi hasil pendapatan ke pihak lain. Tarik-menarik kekuasaan inilah yang sempat menimbulkan ketegangan mengenai titik parkir. Untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari dan untuk merefleksikan aspirasi dari masing-masing pihak, akhirnya penandatanganan MoU digunakan sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan parkir di Pantai Matahari Terbit ini. Seiring berjalannya waktu, pengelolaan parkir pun kini melibatkan banyak aktor formal dan informal.

Dengan peraturan yang tertuang dalam Keputusan Bendesa Adat dan Perda Provinsi Bali Nomor 47 Tahun 2019, akhirnya terciptalah sebuah kesepakatan kerjasama parkir antara PD Parkir, pihak swasta (Skyline) yang dinaungi oleh PT Mitra Maju Dewata dan Desa Adat Sanur dalam pengelolaan parkir. Bercermin dari latar belakang yang telah tertera diatas, penelitian ini akan membahas interaksi dan kepentingan Desa Adat Sanur, ormas Sanur Bersatu, PD Parkir dan pihak swasta (Skyline) dalam pengelolaan parkir di Pantai Matahari Terbit.

Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah berupa bagaimana interaksi antar aktor dalam politik perparkiran di Kawasan Pantai Matahari Terbit?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan tentang interaksi antara Desa Adat Sanur, Organisasi Kemasyarakatan, PD Parkir Denpasar, dan pihak swasta (Skyline).

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam meneliti fenomena interaksi, relasi serta kepentingan antar aktor yang muncul dan berkembang terkait dengan pengelolaan parkir, penulis mengeksplorasi penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan objek material. Pertama, Skripsi dari Ayu Puspita Sari (2012). Penelitian ini menganalisis koneksi antara pemerintah informal dengan formal dalam pengelolaan dan penataan lahan perparkiran di Tepi Jalan Umum Kawasan Malioboro, Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah hubungan yang terjalin antara institusi formal pemerintah dan informal bersifat menggantikan dan saling bersaing. Banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan, sehingga kelompok Paguyuban Parkir Malioboro Ahmad Yani menjadi pengganti bagi pemerintah dalam pengelolaan parkir. *Kedua*, Puspitasari (2013). Penelitian ini menyoroti tentang persaingan antara otoritas tradisional di Yogyakarta dan negara modern. Persaingan kepentingan antara birokrasi formal pemerintah (negara modern) dengan pihak Keraton Yogyakarta (otoritas tradisional) meliputi banyak aspek, baik besar maupun kecil. Salah satu peristiwa kecil yang terjadi di antara otoritas modern

dengan tradisional ialah pengelolaan parkir di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peluang besar untuk memainkan otonomi di hadapan negara modern bisa didapatkan dengan mudah oleh pemimpin yang memiliki garis keturunan keraton.

Ketiga Alrdi Samsa dan Vanni Anggara (2020). Penelitian ini membahas tentang fenomena *shadow state* di Yogyakarta dengan melihat peran Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ka'bah dalam pengelolaan bisnis parkir dan pariwisata di Alun-Alun Utara yang telah di revitalisasi. Pada penelitian ini, pengelolaan parkir dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) yang berada dalam naungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pengelolaan ini tidak terlepas juga dari adanya figure kunci yang menjadi citra dan basis identitas yang dihormati oleh para laskar GPK, yakni Muhammad Fuad Andreago seorang ketua FKKAU (Forum Komunikasi Kawasan Alun-Alun Utara).

State in Society

State in society yang dipopulerkan oleh Joel S. Migdal merupakan bentuk konsep pendekatan yang dapat digunakan dalam menelaah hubungan yang terjadi antara negaradannmasyarakat dalam pengelolaan parkir di Denpasar. Migdal (2012) dalam bukunya yang berjudul *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another* menyebutkan bahwa negara bergerak di dua tempat, yaitu praktek dan citra. Kedua elemen ini bisa dapat saling

tumpang tindih, melemahkan atau menguatkan.

Dalam interaksi *state in society*, negara mencari kontrol sosial didalam masyarakat. Ini adalah poin kunci dari model interaksi negara masyarakat, negara dan organisasi sosial terus berinteraksi untuk mendapatkan kontrol sosial. Migdal berpendapat bahwa struktur masyarakat memiliki pengaruh yang penting secara tidak langsung terhadap implementasi kebijakan negara. Masyarakat dengan kata lain, dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Ekonomi Politik

The Wealth of Nations tahun 1776 yang merupakan buku ciptaan Adam Smith menjadi awal mula terciptanya studi tentang ekonomi politik yang memperkenalkan dasar-dasar pemikiran ekonomi politik yang didefinisikan sebagai teori sosial dan keterbelakangan. Menurut Caporaso dan Levine (2008) pemaknaan terhadap ekonomi politik berfungsi sebagai saran dalam mengatasi masalah ekonomi kepada penyelenggara negara, bukan hanya terpaut dalam studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Kemunculan ekonomi politik juga bertujuan untuk membantu masyarakat, dalam memahami dan mengatasi perubahan pada sistem pemusatan kebutuhan manusia.

Hubungan mutualisme antara ekonomi dan politik berusaha dijelaskan oleh ekonomi politik, yang termuat dalam hubungan negara serta pasar. Kerangka aktivitas ekonomi diarahkan oleh politik

untuk melayani kepentingan dan penggunaan kekuatan dalam kelompok pada berbagai jenis, yang kemudian diproses oleh ekonomi dalam bentuk pendistribusian kekuasaan dan kekayaan. Nantinya, hubungan ini akan mengubah tatanan politik sekaligus merevitalisasi kembali struktur hubungan ekonomi yang baru. Secara garis besar, ekonomi politik merupakan hubungan antara kejadian ekonomi dengan politik, antara pasar dengan negara, antara lingkungan lokal dengan lingkungan interlokal, dan antara masyarakat dengan pemerintah (Jones, 1993).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, digunakan penulis untuk menggambarkan dan menganalisis hasil temuan yang dilakukan di kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur. Informan ditentukan berdasarkan teknik *purposive-sampling*. Penentuan kriteria informan telah ditentukan sesuai penelitian dan dianggap dapat memberikan informasi terkait obyek yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Interaksi Politik Desa Adat Sanur dengan Sanur Bersatu

Sejak awal beropreasinya Pantai Matahari Terbit sebagai kawasan wisata, parkir di Pantai Matahari terbit ini diawasi oleh desa adat dan dikelola langsung oleh pecalang dan organisasi kepemudaan Sanur Bersatu sebagai organisasi

keamanan desa. Oleh sebab itu, lahan parkir yang ditempati oleh pengunjung merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari Desa Adat Sanur. Dalam pengelolaan parkir oleh desa dan ormas, tugas mereka hanya menyediakan lahan parkir dan memungut retribusi parkir tanpa memberikan karcis resmi dari Pemerintah, dan mencetak karcis parkir secara mandiri. Desa Adat Sanur dan Ormas Sanur Bersatu melakukan kesepakatan dan kerjasama langsung dalam pengelolaan parkir.

Dewan desa yang memberikan izin kepada warga Sanur untuk menjadi petugas parkir di kawasannya yaitu di Pantai Matahari Terbit. Fungsi dari bergabungnya anggota ormas Sanur Bersatu dalam pengelolaan parkir, diperuntukkan juga sebagai penjaga wilayah, karena daerah Sanur merupakan wilayah pariwisata yang padat wisatawan.

Namun di samping itu, keberadaan parkir yang belum resmi ini terkadang meresahkan pengunjung. Sehingga banyak laporan pungli dari pengunjung yang merasa keberatan terhadap pungutan parkir di pantai. Berdasarkan laporan tanggal 1 November 2018, akhirnya dilakukan lah penyelidikan dan penangkapan sebelas juru parkir di Pantai Matahari yang menarik uang retribusi parkir dengan tidak bekerjasama dengan PD Parkir Denpasar. Semenjak terjadinya kejadian tersebut, akhirnya Desa Adat Sanur melakukan perjanjian kerjasama dengan PD Parkir sebagai resolusi konflik yang terjadi. Terlepas dari kejadian

tersebut, desa adat tetap memberdayakan pecalang dan ormas Sanur Bersatu namun tidak secara langsung seperti yang dilakukan sebelum terkuaknya kasus pungli. Pemberdayaan ini sekarang lebih dilakukan melalui banjar-banjar adat, tujuannya untuk menambah pemasukan keuangan desa adat dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Sanur disini.

Interaksi Politik PD Parkir dengan Desa Adat

Banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali, membuat para aktor formal maupun informal berlomba-lomba dalam meningkatkan fasilitas penunjang bagi para wisatawan agar nyaman dalam berwisata. Mulai dari fasilitas penginapan, tempat makan atau restoran, dan juga sarana prasarana transportasi. Salah satunya terjadi di kawasan Pantai Matahari Terbit, Sanur. Lokasinya yang strategis di pusat kota sebagai tempat berwisata dan dermaga *fast boat*, menjadikan kawasan ini memiliki intensitas aktivitas yang cukup tinggi di bidang sarana dan prasarana transportasi.

Lahan parkir inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Desa Adat Sanur sebagai alat untuk menambah pendapatan ekonomi desa. Pengelolaan parkir dikelola sepenuhnya oleh Desa Adat Sanur yang dibawahnya menaungi petugas parkir yang terdiri dari pecalang dan anggota kemasyarakatan Sanur Bersatu, tanpa melibatkan PD Parkir sebagai aktor formal dari pemerintahan. Selain untuk meningkatkan perekonomian desa,

pungutan retribusi parkir mandiri ini juga dilakukan untuk memberdayakan masyarakat lokal Sanur agar tidak terlibat dalam hal-hal yang memicu konflik.

Namun kegiatan retribusi parkir ini, menimbulkan permasalahan yang menyenggol cukup banyak pihak. Pada tanggal 1 November 2018, terjadi penyelidikan karena ada laporan pungli dari pengunjung yang merasa keberatan terhadap pungutan parkir di pantai. Berdasarkan laporan dan penyelidikan tersebut, akhirnya dilakukan lah penangkapan 11 petugas parkir di Pantai Matahari Terbit yang menarik uang parkir dengan tidak adanya kerjasama dengan PD Parkir Denpasar.

Setelah muncul peristiwa penangkapan petugas parkir yang diduga melakukan pungli, akhirnya keesokan harinya diadakan pertemuan untuk penandatanganan MoU kerjasama antara Desa Adat Sanur dengan PD Parkir. Penandatanganan MoU ini didasari atas peraturan dalam pemungutan parkir, sekaligus untuk menghindari konflik di kemudian hari. Kerjasama antara pihak Desa Adat Sanur dengan PD Parkir merupakan bentuk keikutsertaan pihak desa adat atas berlakunya hukum positif.

Interaksi Politik PD Parkir dan Desa Adat dengan Skyline

Populasi kendaraan yang terus meningkat di Pantai Matahari Terbit menghasilkan konsentrasi kendaraan yang cukup tinggi pula terhadap ketersediaan tempat parkir. Hal tersebut mengakibatkan beberapa masalah yang sedikit

menghambat aktivitas sirkulasi parkir. Per tanggal 1 Januari 2021, pengelolaan parkir di Pantai Matahari Terbit resmi melibatkan tiga elemen didalamnya, yaitu PD Parkir, kemudian Desa Adat Denpasar sebagai *civil society* dan terakhir adalah Skyline Parking dari pihak swasta.

Dengan bergabungnya Skyline Parking yang menggunakan sistem parkir otomatis dalam pengelolaan parkir di Pantai Matahari Terbit, akses pengunjung menuju kawasan pantai menjadi lebih singkat dan praktis. Pengelolaan parkir di pantai Matahari Terbit, terbagi menjadi tiga pembagian kerja. Pertama, Skyline sebagai *operator*, lalu ada pemerintah yaitu PD Parkir sebagai regulator dan Desa Adat Sanur sebagai penyedia lahan. Dalam pengelolaan parkir di kawasan pantai ini, para aktor menggunakan sistem kontrak yang dilakukan antara Pemerintah dengan pengelola parkir ataupun koordinator.

Analisis Hasil Temuan

State in Society dalam Pengelolaan Parkir

Sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup mempengaruhi bidang ekonomi, sosial, budaya serta politik di Bali. Dengan demikian, aspek pariwisata perlu dikelola dengan baik sehingga dampak positif dapat diberikan kepada lingkungan dan masyarakat sehingga keberlangsungan pariwisata itu sendiri tetap terjaga. Kegiatan pariwisata dapat berjalan secara luar biasa baik apabila terjadinya kerjasama yang kooperatif antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*).

Banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Matahari Terbit, membuat para aktor formal maupun informal berlomba-lomba dalam meningkatkan fasilitas penunjang bagi para wisatawan agar nyaman dalam berwisata. Salah satunya di bidang sarana dan prasarana transportasi. Pada awalnya pengelolaan parkir di Pantai Matahari Terbit ini hanya dikelola oleh Desa Adat Sanur, namun akhirnya pengelolaan parkir mulai dikerjasamakan dengan PD Parkir sebagai aktor pemerintah dan perusahaan swasta.

Dapat dilihat dari pola yang terjadi, pada masa yang lalu desa adat seakan bertransformasi sebagai tuan untuk petugas parkir. Kuasa desa adat juga terlihat dengan peran *bossisme* yang ada. Negara dalam hal ini, seakan tidak mampu mengurus lahan parkir yang ada di kawasan Pantai Matahari Terbit. Negara pada masa itu dinilai belum mampu melakukan perkembangan di kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran organisasi di luar PD Parkir dalam melakukan kegiatan retribusi parkir, pada akhirnya menimbulkan persoalan yang mengurangi kapabilitas PD Parkir sebagai bagian dari negara. Parkir memiliki andil besar dalam PAD, hal inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan antara negara dengan masyarakat adat.

Pada konsep penelitian ini, awal mula terjadi kerjasama karena diduga adanya kasus pungli, yang telah mencoreng nama Desa Adat Sanur. Sebagai resolusi dari permasalahan inilah, akhirnya dewan desa membuat MoU No 55.11/57/2018 dengan PD Parkir dalam

urusan retribusi parkir pantai. Setelah melibatkan pemerintah sebagai aktor formal, Desa Adat Sanur juga turut melibatkan pihak swasta (Skyline) dalam pengelolaan parkir. Pelibatan banyak aktor formal dan informal ini juga didasari dengan dikeluarkannya Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menjadi payung hukum untuk desa adat dalam melakukan pungutan parkir.

Kepentingan dan kesamaan visi misi menjadikan pemerintah, desa adat dan swasta dapat tercapai, proses yang mengutamakan dialog dan komunikasi ini dijalankan pihak desa adat dan pengelola untuk dapat membentuk sebuah peraturan mengenai pengelolaan parkir. Dari penelitian tersebut penulis menggunakan teori dari Joel S. Migdal (2012), yang memperkenalkan pengelolaan parkir dengan konsep *state in society*, dimana dalam interaksi *state in society*, negara mencari kontrol sosial didalam masyarakat.

Dalam proses interaksi *state in society* pemerintah, pihak swasta dan desa adat memberikan kesempatan bagi masyarakat Desa Adat Sanur untuk berpartisipasi dalam pengelolaan parkir, salah satunya masih melibatkan ormas Sanur Bersatu sebagai penjaga keamanan parkir walau tidak secara langsung dan harus mengikuti instruksi serta peraturan dari desa adat. Pelibatan masyarakat Desa Adat Sanur dalam pengelolaannya, pastinya akan mencegah konflik yang mungkin akan terjadi antara pihak pemerintah, swasta dan pihak masyarakat.

Perda no 4 Tahun 2019 mengenai Desa Adat di Bali, juga menjadi dasar untuk pihak desa dalam mengelola sarana dan prasarana di tanah desa, sehingga pecalang dan Sanur Bersatu yang telah menjadi satu kesatuan dengan warga Sanur tetap ikut turun tangan untuk mengelola keamanan parkir di Pantai Matahari Terbit.

Jika sebelumnya *society* berjuang untuk melawan dominasi negara, kini mulai memilih kooperatif dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam upaya mencapai tujuan perjuangan mereka. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat yang demokratis pada akhirnya berpengaruh pada strategi perjuangan *society* dari gerakan perlawanan terhadap dominasi negara menjadi organisasi yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk menumbuhkan kemampuan *bargaining* masyarakat sipil.

Ekonomi Politik pada Proses Pengelolaan Parkir

Keberadaan Pantai Matahari Terbit yang strategis sebagai objek wisata, cukup menarik banyak minat dan perhatian dari wisatawan mancanegara maupun lokal yang berkunjung ke Bali. Peristiwa ini yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak aktor untuk menunjang perekonomian dari masing-masing aktor yang terlibat. Jika menganalisis dengan Teori Ekonomi Politik Caporaso dan Levine, ekonomi dan politik merupakan dua hal yang dimana keberadaannya tidak dapat dipisahkan.

Pada penelitian ini, pengelolaan parkir di Pantai Matahari Terbit berkaitan terhadap kepentingan negara dalam menghasilkan sumber kekayaan baru dalam meningkatkan pendapatan. Pengelolaan parkir ini merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan yang terkondisikan, sebab dalam hal ini relasi kekuasaan dibangun oleh negara dengan masyarakat dan swasta untuk sama-sama memproduksi dan mendistribusikan kekayaan. Pada dasarnya perspektif ekonomi politik berbasis negara inilah yang menempatkan negara sebagai senter dari berbagai kepentingan masyarakat dan masyarakat kelompok yang menjadi kepentingan nasional (Caporaso & Levine, 2008).

Pekerja di bidang parkir ini diisi oleh warga Desa Adat Sanur. Peraturan ini ditetapkan karena dewan desa adat ingin menjamin kesejahteraan masyarakat Desa Adat Sanur. Selain itu mereka juga ingin memberdayakan masyarakat di Sanur terutama untuk warga di usia kerja yang membutuhkan pekerjaan. Hal ini juga berpengaruh terhadap Sanur Bersatu yang merupakan organisasi kepemudaan yang menjaga keamanan daerah Sanur. Proses pembagian hasil yang diberlakukan di parkir Pantai Matahari Terbit ini adalah *sharing profit*..

Pihak swasta (Skyline) wajib memberikan minimum keuntungan sebesar Rp 32.000.000,- tiap bulannya kepada Desa Adat Sanur melalui Bupda Adapun pembagian hasil atas para pihak dengan struktur kerjasama *guarantee income*

ditambah *threshold*. Pihak swasta (Skyline) memberikan pendapatan tetap kepada PD Parkir sebesar 20% dari jumlah kontribusi wilayah yang diberikan PD Parkir kepada Desa Adat Denpasar selaku pemilik lahan. Skyline dan PD Parkir sepakat untuk menetapkan nilai *threshold* sebesar Rp 250.000.000,-. Skyline akan memberikan selisih bagi hasil dari pendapatan parkir setelah dikurangi pajak parkir dan biaya operasional apabila pendapatan parkir diatas nilai *threshold* dengan porsi 20% untuk PD Parkir dan 80% untuk Skyline dan Desa Adat Sanur.

Bertemunya dua kepentingan tersebut, dikarenakan relasi ini berpengaruh terhadap alur ekonomi dan politik yang menjadi sentral terjadinya hubungan timbal balik yang berlangsung. Pertemuan antara kepentingan ekonomi dan politik menjadikan sebuah kekuatan yang kuat karena dibentuk untuk dominasi dalam suatu wilayah yang dikuasai oleh dua kepentingan tersebut.

5. KESIMPULAN

Dalam bagian ini penulis akan menyimpulkan hasil temuan yang diperoleh sebelumnya. Konsep *state in society* dan ekonomi politik yang dibagi penulis mampu menjawab pertanyaan penelitian pada bab pertama. Pola yang terjadi dalam interaksi antara *state in society* berjalan dengan cukup dinamis, karena terjadi suatu interaksi dua arah, baik ketika dalam proses pengambilan kesepakatan bersama maupun padat tahap implementasi kebijakan. Beragam keputusan yang dipilih

oleh negara sejalan dengan kepentingan pihak *state* dan masyarakat (*society*).

Saling ketergantungan dan saling membutuhkan menjadi prinsip yang sangat menjelaskan hubungan antara Desa Adat Sanur, PD Parkir dan swasta (Skyline). Sehingga, pada konsep yang lebih sempit, kesinambungan hubungan antara negara dan masyarakat dapat tercipta. Masyarakat tidak lagi terpinggirkan, tetapi sekarang bisa ikut ambil bagian, baik dalam alur pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan di daerah, walau belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Dalam pengelolaan parkir di Pantai Matahari Terbit, parkir dijadikan sebagai arena politik antar aktor, baik formal maupun informal. Aktor formal yang terlibat adalah PD Parkir yang memiliki legitimasi hukum dalam pengelolaan dan aktor informal yang terlibat meliputi Desa Adat Sanur, paguyuban Sanur Bersatu dan swasta (Skyline).

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Booner, H. (1961). *Social Psychology*. Ronald Press Company.
- Caporaso & Levine. (2008). *Teori-Teori Ekonomi Politik: Edisi Terjemahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ebyhara, A. B. (2010). *Pengantar Ilmu Politik*. Semarang: AR-Ruzz Media.
- Erani, A. Y. (2009). *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Halim, A. (2014). *Politik Lokal Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa.
- Migdal, J. S. (2012). *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. Cambridge University Press.
- Mufti, M. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Subarsono, A. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- JURNAL DAN SKRIPSI
- Azhar, M. A. (2019). *Ormas Dalam Pusaran Klientelisme Broker: Klientelisme Broker Model Ormas Di Pemilu Dan Pemilukada Bali*. *Journal of Policies and Policy*.
- Mitchell. (1997). *Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts?*. *Academy of Management Review*.
- Ozturk, A. (2017). *A critical review of implicit leadership*. *International Journal of Organization*, 397.
- Puspitasari, W. (2013). *Kontestasi Kuasa dalam Pengelolaan Parkir: (Studi tentang Manifestasi Persaingan Antara Negara Modern dengan Otoritas Tradisional dalam kasus Pengelolaan Parkir di Alu-Alun Kidul)*.
- Reed, M. (2009). *Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management*. *Journal of Environment Management*.
- Riananda, R. (2014). *Jasa Pelayanan Parkir di Kawasan Seturan (Studi tentang Relasi Antar Aktor dalam Pengelolaan Jasa Pelayanan Parkir di Kawasan Belanja dan Hiburan Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*.
- Samsa, A., & Anggara, V. (2020). *Relasi Kuasa Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Penguasa (Studi Kasus Praktik Shadow State Gerakan Pemuda Ka'bah Khittah Yogyakarta dalam Pengelolaan Alun-Alun Utara)*. *Jurnal Sosial Soedirman*, 3(1).
- Satrya. (2017). *Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas Dalam Pengelolaan Aset Desa Untuk Mewujudkan Harmonisasi (Studi Pada Desa Adat dan Desa Dinas Sambangan)*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7.

- Suchman, M. (1995). *Managing legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*. *Academy of Management Review* , 574.
- Sumarti, T. (2007). *Sosiologi Kepentingan (Interest) Dalam Tindakan Ekonomi*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 01.
- Syafiuddin, A. (2018). *PENGARUH KEKUASAAN ATAS PENGETAHUAN (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)* .
- Utama, R. A. (2019). *PERAN LOCAL STRONGMAN PADA KONTESTASI POLITIK (Studi Terhadap Kemenangan Agus Sudrajat Pada Pilkades Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya)*. *Political Science*.
- Wicitra, M. W. (2021). *Di Balik Eksistensi Lokalisasi Danau Tempe: Elit Politik dan Shadow State*. *E-Jurnal Politika*.
- Yandi, P., & Suparman. (2020). *Penggunaan Analisis Jaringan Sosial Untuk Mengidentifikasi Pengaruh Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Pasar Tradisional di Kota Tangerang Selatan*. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*.
- Yudiawan, I. D. (2019). *Pendapatan Desa Adat : Kontruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar*. *Udayana Magister Law Journal*.
- ARTIKEL
- Admin. 2019. *Banyaknya Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Diakses pada 23 September 2020 melalui <https://bali.bps.go.id/indicator/17/248/1/banyaknya-kendaraan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>
- Company Profile Perusahaan Daerah Parkir Denpasar*. (n.d.). Diakses pada 15 Juni 2021 melalui <https://pdparkir.denpasarkota.go.id/page/read/498>
- koranjuri.com. (2018). *Belasan Pelaku Pungli di Matahari Terbit Dikeler ke Polda Bali*. Diakses pada 20 Juni melalui <http://koranjuri.com/belasan-pelaku-pungli-di-matahari-terbit-dikeler-ke-polda-bali/>
- Mardiastuti, A. 2018. *11 Jukir di Sanur Di-OTT Pungli, Warga Adat Ngadu ke DPRD*. Diakses pada 29 April 2021 melalui <https://news.detik.com/berita/d-4299736/11-jukir-di-sanur-di-ott-pungli-warga-adat-ngadu-ke-dprd>
- Mustofa, A. (2018). *HOT! Polda Tangkap 11 Oknum Pecalang Pungli di Pantai Matahari Terbit*. Diakses pada 30 Juni 2021 melalui <https://radarbali.jawapos.com/read/>

[2018/11/06/102225/hot-polda-tangkap-11-oknum-pecalang-pungli-di-pantai-matahari-terbit](https://www.wisataexpo.com/pantai-matahari-terbit-sanur/)

Pantai Matahari Terbit Sanur : Harga Tiket,
R. d. (2019). *Wisata Expo*. Diakses
pada 02 Juli 2021 melalui
[https://www.wisataexpo.com/pantai-
matahari-terbit-sanur/](https://www.wisataexpo.com/pantai-matahari-terbit-sanur/)

Putra, T. C. 2021. *Menjamurnya Tukang
Parkir di Tengah Pandemi -
BaleBengong*. Diakses pada 24
Januari 2021 melalui
[https://balebengong.id/menjamurny
a-tukang-parkir-di-tengah-pandemi/](https://balebengong.id/menjamurnya-tukang-parkir-di-tengah-pandemi/)

Sanur, K. (2020). *Sejarah Kelurahan Sanur*.
Diakses pada 03 Juli 2021 melalui
[https://sanur.denpasarkota.go.id/pa
ge/read/710](https://sanur.denpasarkota.go.id/page/read/710)

Yuda. 2018. *PD Parkir Ingatkan
Penyelenggara Parkir Patuhi
Aturan Perda* . Diakses pada 28
Desember 2020 melalui
[https://www.nusabali.com/berita/26
484/pd-parkir-ingatkan-
penyelenggara-parkir-patuhi-
aturan-perda](https://www.nusabali.com/berita/26484/pd-parkir-ingatkan-penyelenggara-parkir-patuhi-aturan-perda)

Keputusan Walikota Nomor 296 Tahun
2004 tentang Pelaksanaan Perparkiran di
Kota Denpasar

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor
11 Tahun 2005 tentang Sistem
Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4
Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

KEPUTUSAN DAN UNDANG-UNDANG

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor: 272/Hk.105/Drjd/96 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Fasilitas Parkir Sarana